

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur adalah bentuk investasi pemerintah yang dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur dapat menyeimbangkan perekonomian, karena dengan infrastruktur yang memadai, akses ke daerah-daerah terpencil dapat lebih mudah dan terjangkau, sehingga kegiatan perekonomian tidak lagi terkonsentrasi di beberapa wilayah besar di Indonesia saja.

Pembangunan Infrastruktur ini didukung oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI No 5 tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Pada tahun 2021 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), salah satunya adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Proyek prioritas strategis tahun 2020-2024 direncanakan dapat mendorong peningkatan konektivitas wilayah dengan melakukan pembangunan jaringan

pelabuhan utama terpadu, pembangunan lanjutan jalan tol trans Sumatra Aceh-Lampung, pembangunan jalan trans Papua Merauke-Sorong, pembangunan jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, pembangunan kereta api Makasar-Pare Pare dan KA kecepatan tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung), serta pengembangan Jembatan Udara 37 Rute di Papua.

Dalam rangka pemulihan ekonomi dan mendukung rencana tersebut, maka pemerintah melakukan perluasan peran serta peningkatan kapasitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan penyelenggaraan negara melalui penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN) khususnya badan usaha yang berkiprah dibidang jasa konstruksi atau tergabung dalam BUMN karya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, "Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Berdasarkan pernyataan tersebut, BUMN karya ialah badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara dan sebagian besar atau seluruhnya adalah milik negara.

Sebagai penyerta modal bagi BUMN karya yang bersumber dari APBN, maka pemerintah harus memastikan bahwa segala bentuk risiko yang berpotensi memberikan tekanan pada APBN dapat diminimalisir. Penyebab tekanan APBN yang dapat teridentifikasi adalah ruginya para pemegang penugasan pemerintah akibat tidak seimbang antara pemberian dana dari pemerintah dengan beban pelayanan umum yang diemban BUMN karya dan juga tidak optimal dalam menggunakan penyertaan modal negara (PMN). Begitu pula sebaliknya, BUMN

karya juga harus menjalankan amanah yang diberikan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia guna membangun kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan.

Selain bertanggung jawab menjalani penugasan pemerintah, BUMN karya sebagai entitas bisnis juga harus berfokus pada kegiatan operasionalnya agar dapat berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan menghasilkan profit. Terutama bagi BUMN karya yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan terbuka, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Perusahaan terbuka artinya pemilik perusahaan publik (pemegang saham) tidak lagi sebatas pada perseorangan atau kelompok tertentu tetapi sudah tersebar luas ke masyarakat Subroto (2014). Dalam hal BUMN maka pertanggung jawaban tidak hanya kepada negara sebagai pemilik saham mayoritas tetapi juga kepada masyarakat. Bentuk pertanggung jawaban atas pemanfaatan sumber daya yang diterima maka perusahaan wajib melaporkan informasi terkait kinerja perusahaan secara keseluruhan yang tertuang dalam laporan keuangan. Tujuan pengungkapan secara umum adalah menyediakan informasi yang membantu investor dan kreditur menilai risiko dan potensi dari *item* yang diakui dan tidak diakui dalam muka (*on the face*) dari laporan keuangan serta membantu investor menilai tingkat pengembalian (*return*) dari investasinya Pratama (2021).

Besarnya kegunaan laporan keuangan sebagai cerminan atas kinerja perusahaan dan juga semakin agresif dan terbukanya perkembangan dunia bisnis, maka perlu didasari dengan alat dan sistem penilaian kinerja untuk menstimulus perusahaan agar lebih efisien dan berdaya saing. Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara memfasilitasi sarana penilaian kesehatan keuangan sebagai standar perhitungan. Penilaian tingkat kesehatan yang termuat dalam surat keputusan tersebut mencakup 3 (tiga) aspek yaitu; aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Predikat penilaian yang digunakan sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Dalam hal ini aspek yang diaplikasikan penulis dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan adalah dari aspek keuangan yang mencakup delapan indikator yaitu, *Return On Equity (ROE)*/ Imbalan kepada pemegang saham, *Return On Investment (ROI)*/ Imbalan investasi, *Cash Ratio*/Rasio kas, *Current Ratio*/ Rasio lancar, *Collection Periods (CP)*, *Inventory Turn Over (ITO)*/ Perputaran persediaan, *Total Asset Turn Over (TATO)*/ Perputaran total aset, dan *Equity to Total Asset (ETA)*/ Rasio total modal sendiri terhadap total aset.

Delapan indikator ini telah banyak digunakan dalam pengujian tingkat kesehatan pada perusahaan-perusahaan terbuka, walaupun telah banyak digunakan masih terdapat banyak perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Penelitian Barmawi (2020) merupakan penelitian yang ditulis dengan menggunakan delapan rasio dan perhitungan yang sama dan menghasilkan simpulan bahwa tingkat kesehatan keuangan PT Waskita merupakan BUMN non-infrastruktur dengan

kinerja keuangan yang sehat ditahun 2018 dengan kategori A dan kategori BBB atau kurang sehat pada tahun 2019.

Penelitian Juwita Rinda Lestari (2022) menunjukkan hasil yang juga berbeda dengan peneliti yang lain, dimana pada rentang waktu 2018 hingga 2020 PT Waskita menunjukkan kesehatan keuangannya kurang sehat. Pada tahun 2018 penelitian ini menyimpulkan penilaian kurang sehat dengan kategori BBB. Di tahun 2019 sedikit membaik walaupun dengan predikat yang sama yaitu dengan kategori BB, tetapi kembali pada tahun 2020 menjadi kurang sehat dengan kategori BBB. Perbedaan hasil perhitungan tingkat kesehatan keuangan meskipun menggunakan indikator yang sama dalam menghitungnya dapat mengakibatkan berbedanya kategori maupun predikat. Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan akun dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi yang dimasukkan ke dalam perhitungan.

Penulis merasa perlu untuk membahas kembali karena adanya letak perbedaan yang selanjutnya akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul "ANALISIS KESEHATAN KEUANGAN BUMN KARYA BERDASARKAN KEP MENTERI BUMN TAHUN 2002 STUDI KASUS: PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK PERIODE 2018-2020".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesehatan PT Waskita Karya periode 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN KEP: 100/MBU/2002 dari aspek keuangan?
2. Bagaimana posisi PT Waskita karya diantara BUMN karya lain berdasarkan tingkat kesehatan keuangannya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis menyusun karya tulis ini antara lain:

1. Mengetahui tingkat kesehatan PT Waskita Karya untuk periode 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN KEP : 100/MBU/2002 dari aspek keuangan.
2. Mengetahui bagaimana posisi PT Waskita Karya diantara BUMN karya lain berdasarkan tingkat kesehatan keuangan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan yang akan dibahas. Pembahasan ini hanya sebatas penilaian kesehatan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk periode 2018-2020 yang didasari Surat Keputusan Menteri BUMN KEP: 100/MBU/2002 khususnya dari aspek keuangan. Dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan penulis menggunakan beberapa rasio yaitu menilai profitabilitas perusahaan dengan menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE)/ Imbalan kepada pemegang saham dan *Return On Investment* (ROI)/ Imbalan investasi. Penulis juga menilai rasio likuiditas dengan menggunakan *Cash*

Ratio/Rasio kas, Current Ratio/ Rasio lancar, Collection Periods (CP). Serta menggunakan rasio aktifitas yaitu *Inventory Turn Over (ITO)/ Perputaran persediaan, Total Asset Turn Over (TATO)/ Perputaran total aset, dan Equity to Total Asset (ETA)/ Rasio total modal sendiri terhadap total aset*. Serta melakukan perbandingan kesehatan keuangan antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap karya tulis tugas akhir ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesehatan keuangan khususnya bagi perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Lewat karya tulis tugas akhir ini diharapkan mampu mendalami ilmu pengetahuan serta menambah ketertarikan dalam dunia keuangan terutama bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi.

b. Bagi pembaca

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna serta memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dalam hal analisis kesehatan keuangan pada perusahaan jasa konstruksi.

c. Bagi pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menyusun strategi yang diambil untuk mempertahankan kesehatan keuangannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang pemilihan topik KTTA, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang sumber-sumber penunjang penulisan berupa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menulis karya tulis tugas akhir ini, meliputi penjelasan mengenai BUMN, perusahaan jasa konstruksi, dan kesehatan keuangan BUMN Karya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan penjelasan tentang metode yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan jasa konstruksi, gambaran umum PT Waskita Karya (persero) Tbk, penjelasan singkat PT Wijaya Karya (persero) Tbk dan PT Adhi Karya (persero) Tbk, dan pembahasan analisis tingkat kesehatan keuangan BUMN karya periode 2018-2020.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan atas pembahasan mengenai tingkat kesehatan keuangan BUMN karya yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.